

**PENTINGNYA PENYUSUNAN LAPORAN EDUKASI PERPAJAKAN
(STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN PAJAK NOMOR PUT-
007950.99/2023/PP/M.IA TAHUN 2024)**

Irawan Purwo Aji

irwan.aji@kemenkeu.go.id

Pusdiklat Pajak, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan

Tri Heni

tri.heni@kemenkeu.go.id

Pusdiklat Pajak, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan

Abstrak

Dalam sistem self-assessment, Wajib Pajak secara mandiri melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Dengan sistem tersebut, tentu saja risiko kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan oleh Wajib Pajak cukup tinggi. Wajib Pajak dituntut untuk memiliki kesadaran untuk melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku. Namun, seringkali Wajib Pajak beralih tidak memahami ketentuan peraturan perpajakan sehingga tidak dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik. Meskipun sudah dilakukan edukasi oleh petugas pajak, Wajib Pajak tetap belum memahami ketentuan perpajakan. Ketika mendapatkan ketetapan pajak, terdapat Wajib Pajak yang berpendapat bahwa mereka belum dilakukan edukasi perpajakan dan ini menjadi argumen Wajib Pajak dalam melakukan upaya hukum di bidang perpajakan. Dalam proses upaya hukum, hakim pada pengadilan pajak juga mempertimbangkan adanya dokumentasi kegiatan edukasi perpajakan pada putusan pengadilan pajak. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti pentingnya penyusunan laporan edukasi perpajakan agar kegiatan edukasi perpajakan dapat terdokumentasi dengan baik. Dengan menggunakan metode yuridis normatif, peneliti akan meneliti ketentuan-ketentuan terkait penyusunan laporan edukasi perpajakan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah ketentuan perpajakan terkait edukasi perpajakan dan putusan pengadilan pajak yang terkait dengan edukasi perpajakan.

Abstract

In the self-assessment system, taxpayers independently carry out their tax obligations. With this system, of course the risk of fulfilling tax obligations by taxpayers is quite high. Taxpayers are required to have the awareness to carry out tax obligations in accordance with applicable regulations. However, taxpayers often argue that they do not understand the provisions of tax regulations so they cannot carry out their tax obligations properly. Even though education has been carried out by tax officers, taxpayers still do not understand the tax provisions. When receiving a tax assessment, taxpayers are of the opinion that they have not received tax education and this becomes the taxpayer's argument in taking legal action in the field of taxation. In the legal action process, judges at the tax court also consider documentation of tax education activities at the tax court. This research aims to examine the importance of tax education reports so that tax education activities can be well documented. Using normative juridical methods, researchers will examine the provisions related to the preparation of tax education reports. The data used in this research are tax provisions related to tax education and tax court decisions related to tax education.

Kata Kunci: *edukasi perpajakan, laporan, putusan pengadilan, kepatuhan wajib pajak*